

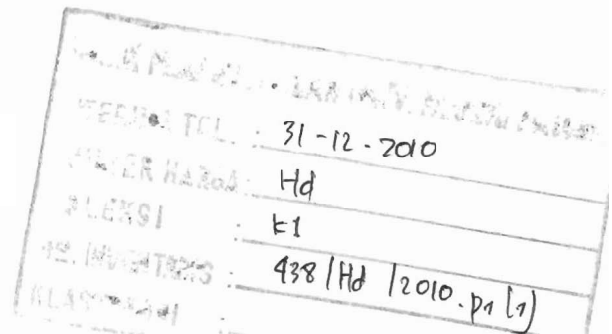


MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

PEMILU 2009 : MENGUKUR JALAN DEMOKRASI

Makalah ini disampaikan pada Diskusi Reguler KPMN Sumatera Barat.

23 September 2008



Oleh

Eka Vidya Putra

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010

PEMILU 2009: MENGUKUR JALAN DEMOKRASI (Catatan untuk Gerakan Masyarakat Sipil)

Oleh : Eka Vidya Putra

Dosen Sosiologi Politik, FIS UNP Padang

Pada tahun 2001, dua tahun setelah pelaksanaan Pemilu pertama di era reformasi Philippe C. Schmitter seorang transisiolog dari European University, Florence, Italia menilai bahwa perjalanan transisi demokrasi di Indonesia masih membutuhkan waktu untuk dapat dikatakan terkonsolidasi.

Indonesia belum memiliki syarat-syarat struktural demokrasi yang baik, maka janganlah berilusi mengenai penampakan perubahan rezim langsung ke arah sana. Ada baiknya memanfaatkan waktu yang tersedia selama beberapa tahun guna melakukan eksperimen kebebasan dan persaingan politik yang terbuka, namun tetap waspada agar tidak kembali kepada otokrasi, dan berharap pada saatnya nanti, keadaan yang dialami akan lebih dari pada pengalaman sebelumnya¹.

Penilaian yang dilakukan oleh Schmitter tersebut didasari pada pengalaman dari sejumlah negara yang lebih dahulu melalui masa transisi. Dari penelitian yang dilakukannya bersama dengan O'Donnell, terungkap bahwa transisi demokrasi sering terbentur atau terkendala pada terbatasnya ketersediaan struktur demokrasi. Lamanya hidup dalam pemerintahan otoriter menjadi salah satu penyebab sulinya tumbuh struktur demokrasi. Namun ketersediaan struktur demokrasi tidak menjadi satu-satunya faktor penentu. Jauh lebih penting itu, faktor keyakinan para aktor demokrasi ternyata lebih menentukan. Sejauh mana aktor demokrasi yakin untuk terus mengkonsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini perjuangan aktor demokrasi sangat tergantung pada keterampilan para aktor dalam melakukan negosiasi dengan kekuatan yang ingin mempertahankan *status quo* dan atau kelompok yang ingin kembali pada sistem otoriter. Selain itu, perbedaan pandangan sesama aktor pro demokrasi tentang bagaimana menjalankan fase transisi – apa dilakukan secara radikal atau konformis – juga menjadi penentu. menjadi modal untuk keluar dari problematika transisi. Siapa yang dimaksud dengan aktor demokrasi ? Arief Budiman mendefinisikan aktor demokrasi adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung membantu perjuangan untuk menegakkan demokrasi². Defensi yang dibuat Arief bermakna luas, dalam artian aktor demokrasi dapat tumbuh dan lahir dimana saja serta pada

¹ Philippe C. Schmitter, *Perkembangan Mutakhir dalam Studi Akademis Demokratisasi: Pelajaran bagi Indonesia dari "Transitologi" dan Konsolidologi*, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Volume 1, Nomor 3, Maret – Juni 2001, Jakarta, The Habibie Ceter, hal: 92

² Arief Budiman dan Olle Tornquist. *Aktor Demokrasi : Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, hal: xxiii-xxiv

level apa saja. Namun, pada masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi yang disebut sebagai aktor-aktor demokrasi biasanya berasal dari kalangan civil society.

Transisi dan Konsolidasi Demokrasi

Secara sederhana transisi dapat diartikan sebagai interval waktu antara satu rezim politik dan rezim politik yang lain. Transisi ini dibatasi "disatu sisi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian, dan disisi lain oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner³. Maka transisi demokrasi dapat diartikan sebagai fase beralihan antara pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokrasi. Menurut O'Donnell dan Schmitter, dua ahli yang banyak melakukan penelitian di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi melihat setidaknya ada dua tahapan yang akan dilalui oleh negara yang sedang melewati masa transisi demokrasi. Kedua tahapan tersebut adalah fase liberalisasi politik dan fase demokratisasi. Liberalisasi politik mencakup perluasan serta perlindungan hak-hak dan kebebasan individu maupun kelompok dari kesewenangan negara atau pihak lain. Liberalisasi politik membuka ruang bagi kemerdekaan warga, sesuatu yang dikekang semasa rezim otoriter pada fase ini mendapat kebebasannya. Sedangkan fase demokratisasi merupakan lanjutan dari fase liberalisasi politik di dalam satu rezim otoriter menuju suatu pemerintahan demokratis. Jadi jika disederhanakan demokratisasi adalah fase mejadi demokrasi yang terkonsolidasi. Konsolidasi dimulai ketika lembaga-lembaga dan tata politik yang baru sudah diorganisir dan mulai bekerja serta berinteraksi menurut aturan-aturan main yang baru pula⁴. Meski tidak seluruh negara yang sedang melalui masa transisi akan berakhir dengan konsolidasi demokrasi, namun pilihan demokrasi tetap akan menjadi harapan banyak negara. Larry Diamond, melihat ada dua dimensi dengan tiga tingkatan yang mempengaruhi terkonsolidasinya demokrasi⁵. Dua dimensi yang mempengaruhi terbentuknya konsolidasi adalah *pertama* dimensi norma dan kepercayaan; dan yang *kedua* adalah dimensi perilaku. Kedua dimensi ini harus menunjukkan keserasian dimana pada struktur masyarakat tersedia aturan, nilai dan norma yang dipercayai sebagai satu-satunya kerangka kerja yang mewadahi dan mewakili kepentingan pribadi dalam kerangka perwujudan kesejahteraan bersama. Sedangkan pada dimensi perilaku ada komitmen para aktor demokrasi dan seluruh warga

³ O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, (jilid IV) Jakarta: LP3ES, 1993, hal.6

⁴ Jose Maria Maravall dan Julian Santamaria, "Perubahan Politik di Spanyol dan Prospek bagi Demokrasi", dalam O'Donnell, Et, al, *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropah Selatan*. hal. 113

⁵ Larry Diamond, *Developing democracy: Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hal.85

untuk menghormati nilai dan norma yang ada diterapkan dalam tindakan keseharian. Oleh karena itu perilaku dalam dimensi ini menyangkut tiga komponen yaitu elite, organisasi dan massa.

Pemilu 2009 dan Keterlibatan Civil Society

Pada pertengahan tahun 2006, disalah satu media massa nasional, Ivan A Hadar melontar idenya agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi partai politik. Argumentasinya, partai politik yang ada sekarang gagal menjadi jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan elite. Partai politik melalui perwakilannya di legislatif maupun di eksekutif lebih berpihak pada kepentingan elite dan tergambar secara transparan dalam kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut. Kondisi tersebut bagi Ivan tidak akan berubah mesti semangat reformasi terus digulirkan. Maka salah satu caranya untuk keluar dari kondisi tersebut, adalah dengan melakukan sirkulasi elite. Dengan cara mengganti kekuatan politik yang ada tapi sudah akut dengan dara baru yang lebih tercerahkan. Kekuatan tersebut adalah LSM. Mengambil fungsi penekan dan bergerak di luar pagar, ternyata tidak cukup efektif mendorong munculnya percepatan dalam perubahan. Namun, gagasan Ivan mendapat tanggapan dari Relly Jehato. Ia melihat LSM harus tetap dijaluinya, sangat samapi tergoda dengan partai politik, bersikap mandiri dan otonom. Partai politik dalam ranah demokrasi lebih bergunan ketika melaksanakan fungsi kontrol dan tetap berada di luar pagar. Hal senada kemudian didukung dengan tulisan Boni Hargens. Boni melihat kehadiran LSM merupakan unsur penting dalam membangun demokrasi. Untuk itu sangat tidak harif jika kemudian mendorong LSM masuk ke ranah politik praktis dalam artian ikut merebut kekuasaan.

Diluar perdebatan tersebut, pada kenyataannya keterlibatan para penggiat LSM dalam ranah politik praktis semakin kelihatan. Perpatokan dari pelaksanaan Pemilu sepanjang orde reformasi, maka Pemilu 2009 dapat dikatakan sebagai puncak dari keterlibatan penggiat LSM dalam ranah politik paraktis. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan pengiat LSM dalam lembaga penyelenggara pemilu – seperti KPU dan Panwas –, menjadi calon anggota parlemen baik di DPR, DPRD maupun di DPD. Kondisi tersebut tentu sangat jauh berbeda dari dua pelaksanaan Pemilu sebelum. Pada Pemilu 1999 dan 2004 keterlibatan penggiat LSM lebih banyak diranah pengawasan melalui lembaga-lembaga pemantau pemilu indenpenden dan atau kegiatan pendidikan politik.

Tidak jauh berbeda dari dua polemik awal, apakah langkah dari sejumlah penggiat LSM ini perlu diberi apresiasi sebagai bentuk keberanian untuk melakukan perubahan dari dalam

pagar atau bentuk penghinaan terhadap institusi atau ide-ide kerelawanan yang telah dibangun selama ini. Agaknya dua perdebatan tersebut nantinya berdamai dengan satu pertanyaan "Apa yang telah mereka lakukan". Artinya penilaian terakhir akan ditentukan dari seberapa kuat aktor untuk tetap kokoh berpedoman pada nilai-nilai substantif yang diusung oleh gerakan *civil society*.

Namun, sebagai bahan refleksi, setidaknya ada dua catatan penting yang perlu menjadi perhatian:

1. Banyak kasus terbukti para pengiat LSM yang mencoba masuk ke ranah politik praktis kemudian terjebak dalam sistem yang ada. Sehingga tidak banyak perubahan yang terjadi. Sistem yang sudah "karatan", beragam kepentingan yang muncul, pengalaman yang masih minim dan nilai-nilai kerja yang berbeda menjadi kendala utama ketika berusaha melakukan perubahan. Artinya perlu pertimbangan yang sangat matang untuk memutuskan masuk ke jalur politik praktis.
2. Ledakkan partisipasi para pengiat LSM untuk pindah kamar ke politik praktis kemudian berdampak pada situasi kekosongan di LSM itu sendiri. Realitas tersebut menjadi problematika dalam dunia LSM dewasa ini. Kondisi itu muncul karena terlalu lambannya LSM dalam melakukan kaderisasi. Alasannya bisa jadi karena beraktifitas di LSM tidak menarik lagi. Kondisi ini diperburuk ketika tidak ada tanggungjawab sosial mantan-manatan pengiat LSM ini untuk ikut bertanggungjawab atas kekosongan tersebut.

Kembali pada apa yang disampaikan oleh Schmitter, untuk keluar dari jarum transisi demokrasi butuh waktu yang panjang. Berapa lamanya, para ahli tidak pernah menyebutkan. Kesiapan aktor demokrasilah yang dapat menjawab apakah bangsa ini telah dapat keluar dari agenda transisi dan melangkah pada konsolidasi demokrasi, atau masih terbuwai dalam *euphoria* liberalisasi politik sehingga fase transisi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Cepat atau lambatnya sangat tergantung pada keseriusan dan ketekunan para aktor demokrasi untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Menyikapi perkembangan terakhir agenda yang paling penting dari kelompok *Civil society* paska Pemilu 2009 adalah kembali mengkonsolidasi gerakan. Semakin menyatunya kekuatan negara (partai politik, elit-elit politia) untuk mendukung pemerintahan berkuasa membawa kekosongan kekuatan penyeimbang. Hematnya kekosongan tersebut dapat menjadi pemicu bagi *civil society* harus kembali mengambil kendali. Dengan cara mengukuhkan dirinya sebagai kelompok penekan yang efektif. –



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM TRANSISI DEMOKRASI

*Makalah ini disampaikan pada Lokakarya Peluang Keterwakilan Perempuan oleh
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sumatera Barat dan IFES Indonesia
pada 17 Mei 2008 di Hotel Pangeran Beach Padang*

TANGGAL	: 31-12-2010
SUMBER DATA	: Hd
KOLEKSI	: K1
NO. INVENTARIS	: 436/Hd/2010-K1 (-)
KLASIFIKASI	:

Oleh

Eka Vidya Putra

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM TRANSISI DEMOKRASI¹

Eka Vidya Putra²

Pendahuluan

Jelang Pemilu 2009 masalah keterwakilan perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan politik kembali hangat diperbincangkan. Secara prinsip, bisa dikatakan tidak ada diskursus baru. Wacananya tetap saja berkisar pada minimnya peran dan posisi yang bisa dimainkan oleh kelompok perempuan. Pada hal dari sisi jumlah perempuan adalah pemilih terbesar. Sebagai penyumbang suara terbanyak, seharusnya perempuan memiliki kesempatan atau peluang yang lebih besar untuk ikut pengelolaan keputusan politik. Budaya patriarki yang masih sangat kuat hidup dalam masyarakat menjadi penyebab perempuan tetap termarginalkan. Konstruksi sosial tersebut sangat kokoh bertahan dan tertanam dalam alam bawah sadar masyarakat karena budaya patriarki ditopang dengan berbagai tafsir agama dan adat istiadat. Selain itu, pencitraan politik yang buas, kejam, kotor dan tidak mengenal ada kawan sejati tapi yang ada kepentingan dari pada gambaran bahwa politik adalah sebuah proses untuk mendapatkan keteraturan masyarakat merupakan pasal lain yang berdampak semakin menjauhkan perempuan dari wilayah ini.

Upaya untuk melakukan penguatan peran politik melalui keterwakilan perempuan di ranah politik terus dilakukan. Dari sisi legal formal penerapan prinsip penerimaan sementara (*affirmative action*) melahirkan kebijakan untuk mengatur keterwakilan 30 persen perempuan di dalam pencalonan legislatif. Sedangkan dari sisi pemilih, dipolopori oleh sejumlah organisasi swadaya masyarakat pencerdasan politik khususnya untuk komunitas perempuan terus dilakukan. Harus diakui masih banyak agenda yang tersisa. Untuk keluar dari kondisi tersebut tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. *Affirmative action* tidak dapat dipungkiri merupakan lompatan kuantum dalam sistem politik Indonesia. Walau hasilnya masih belum menunjukkan angka yang signifikan. Kebijakan setengah hati dari elite, orientasi kekuasaan jangka pendek dan belum adanya keseriusan partai-partai untuk memberi ruang bagi perempuan merupakan kendala untuk mencapai angka keterwakilan tersebut. Sedangkan pendidikan politik yang telah dilakukan masih terlalu sedikit untuk menjangkau para pemilih yang tersebar dipelosok negeri. Bagi kelompok perempuan itu sendiri, masih membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berani keluar dari

¹ Disampaikan dalam lokakarya Peluang Keterwakilan Perempuan yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sumatera Barat dan IFES Indonesia. Pada tanggal 17 September 2008 di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat.

² Dosen Sosiologi Politik pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dan Direktur Revolt Institut

keterkukungan budaya patriarki dan menyadari bagaimana urgensi kehadiran mereka di wilayah politik.

Mencari Sebuah Inspirasi

Bagaimana peluang perempuan dalam pengelolaan keputusan politik dan strategi apa yang dapat dilakukan jelang Pemilu 2009. Ada satu ilustrasi yang baik untuk dijadikan inspirasi, yaitu seputar konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Republik dalam penetapan calon presiden Amerika Serikat 2008 dari kedua partai. Ada dua ilustrasi dari proses tersebut dan melahirkan sejumlah inspirasi.

Pertama; ucapan selamat dan dukungan Hillary Clinton kepada pesaingnya Barack Obama dalam konvensi calon presiden Amerika dari Partai Demokrat mendapat pujian dari banyak kalangan. Secara "jantan" Hillary mengajak seluruh pendukungnya berjuang untuk menjadikan Obama sebagai Presiden Amerika ke depan. Pada kesempatan yang sama Hillary kembali menyampaikan bahwa persoalan perempuan perlu mendapat perhatian pemerintah. Diakhir pidatonya, Hillary kembali mengingatkan bahwa Partai Demokrat telah membutuhkan bahwa seorang warganegara berjenis kelamin perempuan dan seorang warganegara berkulit hitam keturunan Afrika-Amerika memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai presiden.

Kedua; kehadiran Sarah Palin mendampingi McCain sebagai wakil presiden dari kubu Republik disebut-sebut oleh banyak kalangan analis menjadi faktor kunci terjadinya peningkatan popularitas pasangan presiden pesaing Obama. Pencitraan Palin, ibu dari lima anak (satu diantaranya masih balita) dan pidatonya politiknya setelah ditetapkan sebagai pendamping McCain yang menyita perhatian banyak pihak. Kekuatan Palin kemudian terus berlanjut setelah sindiran yang berbau bias gender dari Obama terhadap program ekonomi "babi bergincu" ke kubu McCain. Hasilnya, secara mengejutkan mengubah peta pilihan pemilih Amerika. Kondisi tersebut setidaknya tergambar dari polling yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen. Keunggulan pasangan Obama-Biden pada awal-awal pencalonan, mulai tersaingi oleh pasangan McCain-Palin. menjadi alasan kenapa peta jejak pendapat mulai bergeser ke kubu republik.

Untuk melengkapi dua ilustrasi di atas, akan ditambah satu ilustrasi lain yang dapat dikatakan sebagai satu peristiwa penting pada tahun ini, yaitu ketika Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice berhasil mencairkan hubungan diplomatik antara Pemerintahan Amerika Serikat dan Pemerintahan Libya yang sejak tahun 1953 memburuk.

Dari tiga ilustrasi di atas, berkaitan dengan wacana keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan politik dapat ditarik sejumlah inspirasi;

- (1) Pengakuan atas hak-hak perempuan di wilayah publik, khususnya di ranah politik tidak hanya menjadi isu atau perhatian negara-negara yang sedang menjalankan transisi demokrasi. Di Amerika sendiri isu serupa masih menjadi pembicaraan dan terus diperjuangkan. Artinya, perjuangan untuk keterwakilan perempuan tidak akan selesai dalam satu, dua atau tiga kali Pemilu. Harus ada kesabaran dan usaha yang sistematis dari seluruh komponen masyarakat (*civil society* dan masyarakat politik) agar agenda ini menunjukkan hasil yang maksimal.
- (2) Perjuangan hak-hak perempuan tidak hanya dicapai dengan mendapat kekuasaan tapi juga dengan cara memperjuangkan isu-isu ke-perempuan-an itu sendiri. Artinya, ketika usaha-usaha politik gagal berbuah menduduki kekuasaan, bukan berarti agenda-agenda yang menjadi konsen perempuan ikut kandas dan berhenti diperjuangkan. Hillary setelah melewati perjuangan panjang akhirnya gagal mendapat suara terbanyak dalam konvensi Partai Demokrat. Namun, isu-isu perempuan yang semasa kampanye rajin disuarakan tidak ikut kandas. Melalui kekuatan loby dan dorongan dari loyalis pendukung Hillary yang mayoritas perempuan, agenda tersebut tetap diperjuangkan. Kondisi berbeda terjadi di Indonesia, dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa wacana keterwakilan perempuan baru marak dibicarakan ketika akan memasuki masa-masa Pemilu, dan kemudian kembali sepi ketika Pemilu telah berlalu.
- (3) Peran-peran perempuan di ranah privat (keluarga) yang selama ini menjadi momok kultural yang membebani dan dianggap sebagai penghambat bagi perempuan untuk masuk ke ranah publik, dapat dibalik menjadi modal politik. Menjadi politisi perempuan tidak berarti harus "menyembunyikan" apalagi mengasingkan diri dari wilayah privat. Palin setidaknya menampilkan kekuatan tersebut untuk mendapatkan simpatik publik dan ia berhasil.
- (4) Dukungan dan sensitifitas dari masyarakat pemilih yang berwawasan gender menjadi faktor yang sangat menentukan tumbuhnya kesadaran masyarakat politik yang selama masih bias gender. Obama membuat pernyataan yang dinilai bias gender, pemilih yang "mungkin" selama ini menjadi pendukung Obama akhirnya "menghukum" dan meninggalkan Obama. Masyarakat pemilih yang tercerdaskan memiliki kemampuan untuk menyaring, menyeleksi dan memutuskan pilihannya. Elit politik dan partai politik yang tidak memiliki wawasan gender akan sendirinya tersingkir jika warganya tercerdaskan dengan pendidikan politik yang sensitif gender.
- (5) Kualitas perempuan tetap saja menjadi prasyarat utama untuk menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di ranah publik dinantikan, dibutuhkan, dan diperhitungkan. Sehingga kehadiran perempuan di ranah publik tidak hanya dipandang hanya sebatas

keterwakilan dalam artian jumlah. Salah satu argumntasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang anti gender dan sekaligus titik lemah dari perjuangan perempuan ketika masuk ke wilayah publik selain ada budaya patriarkhi juga pada masalah kualitas. Keduanya saling berhubungan, minimnya kualitas bisa jadi disebabkan karena budaya patriarkhi yang tidak memberikan kesempatan dan ruang bagi perempuan untuk menimba pengalaman.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Tidak dapat dipungkiri – meskipun masih banyak kelemahan – kebijakan politik tentang kesempatan kepada perempuan untuk masuk ke arena pengambil kebijakan merupakan loncatan kuantum dalam dinamika politik di Indonesia. Loncatan kuantum tersebut dapat ditunjukkan dengan lahirnya dua undang-undang politik, yaitu UU No. 31/2002 tentang Partai Politik, UU No. 12/2003 tentang Pemilu dan yang paling terakhir UU No. 10/ 2008. Ketiga undang-undang tersebut mencantumkan sebuah klausul mengenai tindakan affirmative untuk keterwakilan perempuan. Pada UU No. 31/2002, dalam penjelasan Pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan jender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan. Sedangkan pada UU No. 12/2003 pada Pasal 65 (1) secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pada Pemilu 2009 keterwakilan perempuan sebesar 30 persen menjadi syarat bagi penyusunan daftar calon legislative. Tidak hanya itu, ada komitmen untuk menempatkan satu caleg perempuan dalam tiga pengajuan caleg. Hal itu tentu saja bertujuan untuk menempatkan caleg perempuan tidak hanya pada nomor urut bawah.

Meskipun masih jauh dari angka 30 persen komposisi keterwakilan perempuan di Parlemen terus meningkat. Walau sebetulnya capaian target 30 persen pun tidak menjadi tujuan akhir dari kehadiran UU tersebut. Sinyal tersebut sangat jelas terbaca, angka 30 persen yang tertera hanya untuk pencalonan. Logikanya tidak mungkin semua perempuan yang dicalonkan oleh partai politik akan mendapat kursi. Jadi semangat yang dibawa lebih pada pembukaan ruang bagi perempuan untuk hadir di ranah politik. Dari hasil Pemilu 1999, perwakilan perempuan di Indonesia tercatat sebanyak 8,8 persen di DPR dan 8,6 persen di MPR. Sedangkan pada tahun 2004 jumlah keterwakilan perempuan meningkat menjadi 11,6 persen. Bagaimana di tahun 2009 apakah akan terjadi peningkatan keterwakilan ? Berdasarkan pengamatan sejumlah ahli, perubahan yang terjadi dalam UU No 10/ 2008 akan berdampak pada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Meski perubahan tersebut tetap tidak akan beda jauh dengan angka sebelumnya.

Hal senada juga terjadi di parlemen pada tingkat daerah. Sumatera Barat misalnya, keterwakilan perempuan di parlemen juga meningkat. Pada Pemilu 1999 keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat sebanyak 7,4 persen. Sedangkan Pemilu 2004 meningkat menjadi 9 persen. Sedangkan untuk Pemilu 2009 hasil verifikasi dari total calon anggota legislatif yang diajukan 37 partai politik secara keseluruhan berjumlah 961 orang dan 308 diantaranya adalah perempuan, berarti mencapai angka 47 persen. Angka tersebut perlu diberi catatan masih ada sejumlah partai yang 0 persen keterwakilan perempuannya.

Seterusnya bagaimana prediksi jumlah keterwakilan pada Pemilu 2009 ? Apakah dengan angka tersebut akan berdampak signifikan bagi keterwakilan perempuan di parlemen atau hasilnya nanti tidak akan sefantastis angka di tahap pencalonan. Setidaknya ada sejumlah indikasi yang patut dijadikan perhatian;

- (1) Dilihat dari nomor urut yang diajukan oleh partai politik, rata-rata caleg perempuan berada pada nomor yang berada perioritas ketiga. Artinya, penempatan perempuan diprioritas ketiga hanya sebatas pemenuhan standar 30 persen yang diisyaratkan UU. Berada pada nomor urut tiga bagi partai besar sudah cukup baik untuk mendapatkan peluang kursi di legislatif. Tapi bagi partai kecil, nomor urut tiga masih cukup jauh peluangnya untuk dapat terpilih.
- (2) Kebijakan sejumlah partai untuk memberlakukan suara terbanyak justru merugikan perempuan. Meski sudah berada pada nomor atas, tapi dengan suara terbanyak peluang perempuan kembali menipis. Peluang caleg perempuan lebih dikenal oleh masyarakat tidak terbukti sepenuhnya. Keterbatasan waktu, berakibat pada keterbatasan untuk menjangkau para pemilih yang tersebar di daerah-daerah. Banyak dari caleg perempuan baru muncul ketika daftar caleg disampaikan oleh partai politik. Artinya kesempatan untuk memperkenalkan diri pada pemilih akan lebih sedikit.
- (3) Munculnya politisi perempuan belum didasari pada proses rekrutmen yang terencana. Artinya belum ada proses kaderisasi yang cukup baik dari partai politik. Faktor kedekatan keluarga dapat dilacak dari figur-figur perempuan yang muncul. Artinya kehadiran perempuan sebagai caleg lebih cenderung untuk mendukung pencalonan laki-laki. Anggapan bahwa perempuan yang berkualitas, berpendidikan tinggi sudah berkerjaan di sektor formal seperti pegawai negeri – yang notabene tidak boleh dicalonkan oleh partai politik – tidak perlu dibantah. tapi perempuan yang masuk ke kancah politik praktis tidak memiliki potensi jelas tidak tepat. Wilayah politik praktis tidak mutlak ditentukan oleh pendidikan tinggi, tapi juga berkaitan dengan keterampilan. Dengan begitu, pengalaman atau lama ”jam terbang” jauh lebih mempengaruhi kualitas perempuan.

- (4) Secara sosial dan budaya masyarakat kita masih memandang wilayah politik masih menjadi daerahnya laki-laki. Praktek politik pada wilayah praktis yang dilakoni oleh elite selama ini telah menempatkan politik pada rimba belantara yang dipenuhi dengan binatang buas yang tidak ada aturan. Daerah yang tidak akrab dengan perempuan.

Jadi, kemungkinan akan terjadi peningkatan yang fantastis keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 masih sangat jauh untuk teralisasi.

Penutup

Pemilu 2009 memiliki arti penting bagi keberlanjutan transisi demokrasi di Indonesia. Menurut para transisiolog, Pemilu ketiga setelah tumbangny rezim otoriter merupakan saat yang tepat untuk mengukur apakah nilai-nilai substantif demokrasi telah masuk pada tahap pelembagaan politik atau masih terus larut dalam eforia liberalisasi politik. Pada konteks ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu ke depan tidak hanya dinilai dari apakah telah dilaksanakan tepat waktu, jujur, adil dan partisipatif. Tapi jauh dari itu, Pemilu dilihat secara kualitas pada proses dan capaiannya. Kualitas proses adalah apakah Pemilu telah disadari oleh seluruh komponen bangsa sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sedangkan pada kualitas capaian adalah apakah hasil dari Pemilu tersebut telah menggambarkan kehendak rasional masyarakat.

Pada konteks peningkatan kualitas demokrasi yang supantif tersebut ide-ide keterwakilan perempuan seharusnya sudah berjalan selangkah, yaitu munculnya kesadaran bersama bahwa kehadiran perempuan di ranah politik tidak hanya sebatas jumlah, tapi pengakuan atas kesederajatan atas hak-hak perempuan jauh lebih penting. Untuk sampai kea rah sana sedari awal ketika membicarakan keterwakilan perempuan di ranah politik selalu ada dua pendekatan; pertama kelompok yang mendorong untuk melakukan *affirmative action* dan kelompok yang menginginkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan. Bagi masyarakat yang sedang melewati masa transisi menuju demokrasi seperti Indonesia kedua pendekatan tersebut tidak perlu dipertentangkan. Tindakan *affirmative action* perlu karena kita tidak bias serta merta menciptakan masyarakat yang secara budaya terwarisi dengan pola fakir yang bias gender tiba-tiba berubah. Secara legal formal apa yang tertuang dalam UU nomor 10/ 2008 merupakan langkah maju dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. Melalui pendekatan *affirmative action* ini setidaknya memaksa partai politik dan para elite politik yang mayoritas laki-laki untuk tidak mengabaikan kehadiran perempuan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan *affirmative action* bias sebatas hitungan angka jika tidak diimbangi dengan terjadinya peningkatan pemahaman yang berbuah menjadi kesadaran dari para elite dan pemilih itu sendiri. Nah, rekomendasi apa yang pantas diajukan untuk peningkatan kedepan. Inspirasi yang kita ambil dari ilustrasi di Amerika di atas dapat menjadai jawabannya.